

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai analisis pajak hotel dan pajak restoran kontribusinya pada PAD dan implikasinya terhadap kemandirian daerah Kota Bandung, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Gambaran mengenai penerimaan pajak hotel di Kota Bandung untuk tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 dari hasil analisis tentang laju pertumbuhan pajak hotel menunjukkan bahwa pertumbuhan pajak hotel mengalami pertumbuhan positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,51%, *tax effort* pajak hotel Kota Bandung mencapai 0,2131% memperlihatkan masih rendah dan berdasarkan *Boston Consulting Group* (BCG) daya pajak (*tax effort*) pajak hotel berada pada sektor terbelakang hal itu dapat diartikan Kota Bandung belum berhasil mengoptimalkan potensi pajak hotel secara maksimal dan terjadi inflansi dalam pelaksanaan pemungutan pajak, sementara rasio efektifitas pajak hotel pertahun sangat efektif.
2. Gambaran mengenai penerimaan pajak restoran di Kota Bandung tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 dari hasil analisis laju pertumbuhan pajak restoran mempunyai rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 14.19% dengan kriteria pertumbuhan yang positif dan *tax effort* pajak restoran selama tahun 2004 sampai dengan 2009 mempunyai persentase rendah

yaitu sebesar 0,1826% dan berdasarkan *Boston Consulting Group* (BCG) daya pajak (*tax effort*) pajak restoran berada pada kuadran III yaitu ada pada sektor terbelakang dengan kata lain kemampuan pemerintah daerah kota Bandung dalam mengumpulkan pajak hotel masih sangat rendah dan terjadi inefisiensi dalam pemungutan pajak restoran, sedangkan rasio efektifitas pajak restoran pertahunnya tergolong sangat efektif.

3. Gambaran mengenai pendapatan asli daerah di Kota Bandung tahun 2004 sampai dengan 2009 dari hasil analisis rasio laju pertumbuhan PAD dikategorikan bahwa pemerintahan kota Bandung kurang maksimal dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah secara maksimal, sedangkan hasil rasio elastisitas PAD dengan menggunakan PDRB atas dasar harga berlaku mempunyai kriteria yang elastis dengan persentase 62,694 sedangkan berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan mempunyai elastisitas dengan rata-rata persentase 134,7%, maka dapat disimpulkan PAD kota Bandung menunjukkan hal yang sama yaitu elastisitas terhadap PDRB yang menunjukkan perkembangan PAD sejalan dengan perkembangan perekonomian Kota Bandung.
4. Gambaran tingkat kemandirian daerah Kota Bandung dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 secara umum mempunyai kriteria rata-rata kurang baik dengan nilai rasio 16,729%, hal ini menunjukkan tranfer dana perimbangan pemerintah pusat lebih dominan dengan kata lain kemampuan PAD terhadap TPD sangat rendah. Sedangkan pola

hubungannya dengan persentase tersebut menunjukkan pola hubungan yang bersifat instruktif antara pemerintah daerah dan pusat.

5. Kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD di Kota Bandung tahun 2004 sampai dengan 2009 secara nominal mengalami peningkatan yang cukup signifikan tiap tahunnya namun masih tergolong kurang dan menunjukkan nilai yang pluktuatif dengan rata-rata kontribusi tiap tahunnya sebesar 19,47 %. Sedangkan sumbangan terhadap total pajak daerah Kota Bandung tergolong cukup dengan rata-rata sumbangan 28,268%
6. Kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap PAD di Kota Bandung tahun 2004 sampai dengan 2009 secara nominal cukup signifikan tiap tahunnya namun masih tergolong kurang dan menunjukkan nilai yang pluktuatif dengan rata-rata kontribusi tiap tahunnya sebesar 16,57 %. Sedangkan rata-rata sumbangan pajak restoran terhadap total pajak daerah sebesar 23,92% dan mempunyai kriteria cukup.
7. Implikasi pajak hotel dan pajak restoran pada PAD terhadap Total Pendapatan Daerah di Kota Bandung tahun 2004 sampai dengan 2009 secara nominal cukup signifikan tiap tahunnya dan menunjukkan nilai yang fluktuatif dengan rata-rata kontribusi tiap tahunnya sebesar 15,77% yang menunjukkan kriteria kinerja keuangan kurang baik.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Gambaran penerimaan pajak hotel Kota Bandung walaupun laju pertumbuhannya tergolong positif dengan kriteria pertumbuhan 15,51% masih mempunyai kriteria tidak berhasil dan daya pajak yang masih berada di sektor terbelakang pada matriks BCG dengan arti potensi kota Bandung masih rendah dan inflansi dalam pemungutan pajak, maka pemerintah Kota Bandung perlu menggali potensi pajak hotel secara maksimal. Hedaknya terdapat informasi yang lengkap mengenai biaya pemungutan (*collection cost*) yang dipergunakan dalam memungut pajak daerah terutama pajak hotel dan pajak restoran. Informasi ini akan menunjukkan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan penerimaan pajak yang diterimanya. Sehingga dapat diketahui apakah pemungutan pajak tersebut efisien atau tidak.
2. Gambaran penerimaan pajak restoran sama halnya dengan pajak hotel dengan laju pertumbuhan yang hanya mencapai 14,19% walaupun pertumbuhannya positif namun masih menunjukkan kriteria pertumbuhan yang tidak berhasil dengan daya pajak ada pada kuadran III pada matriks BCG dengan arti potensi pajak restoran Kota Bandung masih rendah dengan tingkat inflansi pemungutan pajak yang masih tinggi. Melihat hal ini pemerintah perlu melakukan hal yang sama dengan pajak hotel terhadap pajak restoran terutama dalam hal daya pajak untuk untuk pajak

restoran perlu ditangani secara lebih serius karena lebih kecil dibandingkan pajak hotel.

3. Pertumbuhan PAD di Kota Bandung yang masih mempunyai kriteria pertumbuhan yang tidak berhasil perlu ditingkatkan melalui peningkatan komponen-komponen PAD disertai dengan peningkatan pelayanan publik dan penyederhanaan prosedur administrasi pembayaran pajak.
4. Kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD sebesar 19,47% masih mempunyai kriteria kurang baik maka pemerintah perlu melakukan perbaikan manajemen pajak hotel yang perlu dilakukan pemerintah daerah antara lain dengan memperbaiki *data base* wajib pajak yaitu melakukan pendataan secara langsung dan pendataan ulang secara berkala. Sehingga pertumbuhan pajak hotel dan restoran semakin menunjukkan pertumbuhan yang positif dan meningkat serta sebagai acuan dalam penataan target penerimaan setiap periode yang akan semakin memberikan kontribusi yang lebih terhadap total pajak daerah PAD. Komputerisasi administrasi pajak yang terkoneksi dengan sistem informasi pihak hotel, melakukan sosialisasi pajak secara memadai, pemberian apresiasi kepada wajib pajak yang taat pajak, dan kemungkinan *outsourcing*. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran hendaknya lebih ditingkatkan lagi dan petugas bekerja secara profesional sesuai peraturan yang berlaku.
5. Kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap PAD sebesar 16,57% masih mempunyai kriteria kurang baik melihat hal ini sama dengan

kontribusi pajak hotel maka pemerintah perlu penanganan yang sama halnya seperti pada pajak restoran yaitu melakukan perbaikan manajemen pajak restoran yang perlu dilakukan pemerintah daerah antara lain dengan memperbaiki *data base* wajib pajak yaitu melakukan pendataan secara langsung dan pendataan ulang secara berkala. sehingga pertumbuhan pajak hotel dan restoran semakin menunjukan pertumbuhan yang positif dan meningkat serta sebagai acuan dalam penataan target penerimaan setiap periode yang akan semakin memberikan kontribusi yang lebih terhadap total pajak daerah PAD. Komputerisasi administrasi pajak yang terkoneksi dengan sistem informasi pihak hotel, melakukan sosialisasi pajak secara memadai, pemberian apresiasi kepada wajib pajak yang taat pajak, dan kemungkinan *outsourcing*. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran hendaknya lebih ditingkatkan lagi dan petugas bekerja secara profesional sesuai peraturan yang berlaku.

6. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah Kota Bandung masih kurang baik maka pemerintah perlu menggali potensi PAD lebih serius lagi, terutama sektor pajak karena pajak merupakan sektor yang mempunyai potensi yang cukup besar memberi sumbangan pada PAD, sektor pajak daerah Kota/Kabupaten yang cukup baik untuk di tingkatkan adalah pajak hotel dan restoran adalah keduanya bersifat mengembang (*buoyant*) dan punya kemampuan yang cukup untuk menghasilkan (*yield*) secara substansial.

7. Pola hubungan pemerintah Kota Bandung dengan pemerintah pusat yang masih bersifat instruktif menunjukkan transfer pemerintah pusat terhadap Kota Bandung masih sangat tinggi hal ini dikarenakan kontribusi PAD yang masih sangat rendah dengan kata lain kemandirian Kota Bandung masih sangat rendah, menyikapi hal tersebut pemerintah daerah perlu lebih meningkatkan kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah dengan melakukan pembenahan terhadap sumberdaya manusia yang menjadi motor dalam pengumpulan PAD, dan memperbaiki sistem manajemen dalam dinas pendapatan daerah.

